

**PENGARUH RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI *FINANCIAL*
DISTRESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014-2018**



Skripsi Oleh

NAHDIYA WILIS CENDYKIA

01031381621122

Jurusan Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

(2021)

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI *FINANCIAL*
***DISTRESS* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA**
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014-2018

Disusun oleh:

Nama : Nahdiya Wilis Cendykia
NIM : 01031381621122
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal:

Ketua



Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak

NIP. 19580828 198810 1 001

Tanggal:

Anggota



Muhammad Farhan, S.E., M. Si

NIP. 19831215 201504 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI *FINANCIAL*
DISTRESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014-2018**

Disusun oleh:

Nama : Nahdiya Wilis Cendykia

NIM : 01031381621122

Fakultas : Ekonomi

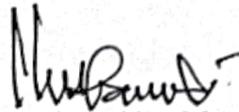
Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 08 Februari 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 08 Februari 2021

Ketua,



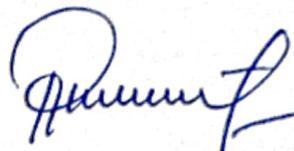
Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak
NIP. 19580828 198810 1 001

Anggota,

Anggota,



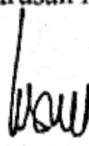
Muhammad Farhan, S.E., M. Si
NIP. 19831215 201504 1 002



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19640903 199403 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
26/2/2021


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA
NIP. 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nahdiya Wilis Cendykia

NIM : 01031381621122

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014-2018

Pembimbing:

Ketua : Drs. H. Burhamuddin, M. Acc., Ak

Anggota : Muhammad Farhan, S.E., M. Si

Tanggal Ujian : 08 Februari 2021

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 08 Februari 2021

Pembuat Pernyataan



Nahdiya Wilis Cendykia

NIM. 01031381621122

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Yakinlah, jalan yang ALLAH berikan jauh lebih baik dari apa yang kau fikirkan”

“Jika terjadi suatu hal yang tidak mengenakan yang kau terima maka jangan kau bertanya kepada-Nya, tetapi bertanyalah kepada dirimu kesalahan apa yang telah kau perbuat”

“Jika kau mempermudah jalan orang lain, percayalah ALLAH akan mempermudah kembali jalanmu”

“Jangan takut. Tidak peduli seberapa lambat kamu melangkah selama kamu tidak berhenti. Karena rezeki setiap orang berbeda-beda dan sudah ditempatkan di tempat dan waktu yang tepat”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Allah SWT dan Rasulullah
Muhammad SAW
- Ayah dan ibu
- Adik-adikku
- Sahabat dan teman-temanku
- Almamaterku Universitas
Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan pertolongan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014-2018”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas anggaran dalam memprediksi *financial distress*. Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun kendala tersebut dapat diatasi berkat bimbingan, doa dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat diperbaiki pada penelitian-penelitian selanjutnya. Harapannya semoga skripsi ini menjadi suatu karya yang bermanfaat bagi pembaca dan menjadi amal jariah.

Indralaya, Februari 2021



Nahdiya Wilis Cendykia

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014-2018”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, motivasi, dan do'a yang diberikan oleh berbagai pihak, sehingga penulis dapat melewati berbagai hambatan dan rintangan selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin berterima kasih kepada :

1. **Allah SWT** yang masih memberikan Nikmat, Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Rasulullah SAW** yang telah menjadi Suri Tauladan bagi penulis dalam kehidupan di dunia ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Srwijaya.
5. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah mempermudah proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
6. Bapak **Drs. H. Ubaidillah, MM., Ak** selaku dosen pembimbing akademik, yang telah membimbing selama masa perkuliahan.

7. Bapak **Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak** selaku Dosen Pembimbing I yang telah membagikan ilmunya, dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, koreksi, serta arahan selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak **Muhammad Farhan, S.E., M. Si** selaku Dosen Pembimbing II yang telah membagikan ilmunya, dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran-saran dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
9. Ibu **Rika Henda Safitri, S.E., M. Acc., Ak** selaku dosen penguji seminar proposal dan Ibu **Hj. Rochmawati Daud, S.E., M. Si.,Ak** selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran dalam perbaikan skripsi.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman selama masa perkuliahan.
11. Staff Kepegawaian Administrasi dan seluruh karyawan yang telah membantu banyak hal dalam perbaikan masalah akademik selama perkuliahan.
12. Kepala Perwakilan dan seluruh karyawan serta pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan yang telah mengizinkan dan banyak memberikan bahan dan data guna terselesainya skripsi ini.
13. Teruntuk Nahdiya Wilis Cendykia, Terima kasih atas segala usaha, jerih payah dan tetap semangat dalam menyelesaikan tanggungjawab ini. Apapun yang telah dilalui semoga mendewasakanmu dan membuatmu menjadi manusia yang terus lebih baik dari ini. Kamu hebat nad!!!
14. Kedua orang tuaku, Bapak Akmal dan Ibu Desmisawati yang selalu memberikan kekuatan, kasih sayang serta dukungan moril dan materiil. Atas doa yang selalu

dipanjatkan dan segala nasihat yang diberikan, penulis sangat bersyukur dan berterima kasih.

15. Adik-adikku akde dan wira yang selalu memberikan semangat, motivasi, canda tawa dan bantuan ketika penulis membutuhkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Teruntuk Nurrizka Noviana dan Rizka Fadilah, Fadhilah Rahmah, Terima kasih banyak sudah bersedia untuk penulis repotkan. Terimakasih telah membantu dan kebersamai dari awal sampai akhir perskripsian ini. Menjadi tempat berbagi suka duka, ke-overthinking-an, cerita, berdiskusi, dan bertanya dan selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan. Terima kasih sudah menjadi pendengar dan teman yang sangat baik!!
17. Sahabat Tipu-tipu (Hendi Setiawan dan M. Imam Ilman) terima kasih selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan, terima kasih atas hiburan, canda tawa dan selalu kebersamai dimasa perkuliahan, terima kasih sudah memotivasi walau dengan cara yang berbeda. Kalian luar biasa!!
18. Wong Kito Galo (Dhea Zalina Putri, Yessy Yustriyani, Wahyu Sanjaya, Thomas Liman) terima kasih atas kebersamaannya dalam menjalani masa perkuliahan, tempat berbagi cerita canda tawa, semoga kita selalu saling support.
19. Sharah Rizki, Nurhabibah teman seperbimbingan skripsi yang telah banyak membantu dan berbagi info selama proses bimbingan. Terima kasih telah berbagi keluh kesah dan berjuang bersama hingga akhir. Dan Reva Meisia teman satu penguji yang sudah membantu dan bersedia berbagi informasi ketika penulis bertanya.

20. Riki Pebrianto adik tingkat SMA yang sudah mau direpotkan, selalu ada, dan tidak pernah berkata tidak ketika penulis membutuhkan bantuan, terima kasih banyak ki!
21. Imam Apriandi teman seperjuangan yang sudah mendengarkan dan berbagi keluh kesah perskripsian dan saling berbagi informasi ketika penulis membutuhkan, terima kasih mam!
22. Lika Rizsya Farevy terima kasih canda tawa dan sudah memberikan motivasi serta masukkan-masukkan yang membantu penulis.
23. Kepada Kak Upit terima kasih kak sudah membantu ketika penulis kesulitan sehingga penulis tetap bisa melanjutkan skripsi ini. Bang Agus terima kasih banyak bang atas bantuan dan selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan serta selalu bersedia mendengarkan keluh kesah tentang perskripsian ini.
24. Keluarga IKA SMANSA (Bang Reno, Berliani, M. Fachrul Azry, Bang Eko Wahyudi, Lestari Rahayu, Rima Lestari) terima kasih banyak atas kebersamaannya dari awal perkuliahan, kepeduliannya serta dukungannya hingga akhir perkuliahan.
25. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2016 Kampus Indralaya terima kasih atas kebersamaannya selama masa perkuliahan.
26. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih ditingkatkan dikemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak.

Indralaya, Februari 2021



Nahdiya Wilis Cendykia

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Nahdiya Wilis Cendykia
NIM : 01031381621122
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi
Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2014-2018

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, 08 Februari 2021

Ketua

Anggota

Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak
NIP. 19580828 198810 1 001

Muhammad Farhan, S.E., M. Si
NIP. 19831215 201504 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

ABSTRAK

PENGARUH RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI *FINANCIAL DISTRESS* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014-2018

Oleh:

Nahdiya Wilis Cendykia
Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak
Muhammad Farhan, S.E., M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi *financial distress* Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder berupa laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode teknik sensus. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel fleksibilitas keuangan, solvabilitas jangka pendek, dan solvabilitas jangka panjang secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan variabel kemandirian keuangan dan solvabilitas anggaran berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Kata Kunci: *Financial Distress*, Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Anggaran

Ketua



Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak
NIP. 19580828 198810 1 001

Anggota



Muhammad Farhan, S.E., M. Si
NIP. 19831215 201504 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

ABSTRACT

**THE INFLUENCE OF FINANCIAL RATIOS IN PREDICTING THE
FINANCIAL DISTRESS OF LOCAL GOVERNMENTS
IN SOUTH SUMATRA PROVINCE
BUDGET YEAR 2014-2018**

By:

Nahdiya Wilis Cendykia
Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak
Muhammad Farhan, S.E., M. Si

This research aims to examine the effect of financial ratios in predicting the financial distress of Local governments in South Sumatra Province. This research used quantitative approach. The data used in this research was secondary data in the form of financial reports of the local Governments in South Sumatra Province in 2014-2018. The population in this study were all local governments in South Sumatra Province. The sample in this study used the census technique method. The data analysis technique used was logistic regression analysis. The results showed that the variable financial flexibility, short-term solvency, and long-term solvency partially had no significant effect on financial distress the budget solvency variable had significant effect on financial distress.

Keywords: Financial Distress, Financial Independence, Financial Flexibility, Short Term Solvency, Long Term Solvency, Budget Solvency

Chairman



Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak
NIP. 19580828 198810 1 001

Member



Muhammad Farhan, S.E., M. Si
NIP. 19831215 201504 1 002

*Acknowledge by,
Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nahdiya Wilis Cendykia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 26 April 1998
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Dusun Kali Batas, Blok N.13 RT.026 RW.001
Desa Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Jambi
Alamat email : nahdiyawilis24@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

2003 – 2004 : TK Al-Kautsar
2004 – 2010 : SD Negeri 76/IX Mendalo Darat
2010 – 2013 : SMP Negeri 17 Kota Jambi
2013 – 2016 : SMA Negeri 1 Muaro Jambi
2016 – 2021 : Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

2018 : Prospek Akuntansi
2020 : Peserta Magang Telkom
2020 : Peserta Magang Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL)

PENGALAMAN ORGANISASI/ VOLUNTER

2017 – 2018 : Sekretaris Divisi Dana Usaha Himpunan
Mahasiswa Jambi Sumatera Selatan (HIMAJA
SUMSEL)
2018 : Anggota UKM UNSRI Mengajar

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II STUDI PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Going Concern (<i>Going Concern Theory</i>)	14
2.1.2 <i>Financial Distress</i>	15
2.1.3 Belanja Modal	16
2.1.4 Kemandirian Keuangan	17
2.1.5 Fleksibilitas Keuangan	18
2.1.6 Solvabilitas Jangka Pendek	19
2.1.7 Solvabilitas Jangka Panjang	19

2.1.8	Solvabilitas Anggaran.....	20
2.2	Penelitian Terdahulu	20
2.3	Alur Pikir	25
2.4	Hipotesis	26
2.4.1	Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap <i>financial distress</i>	26
2.4.2	Pengaruh Fleksibilitas Keuangan terhadap <i>financial distress</i>	27
2.4.3	Pengaruh Solvabilitas Jangka Pendek terhadap <i>financial distress</i> ..	28
2.4.4	Pengaruh Solvabilitas Jangka Panjang terhadap <i>financial distress</i> .	28
2.4.5	Pengaruh Solvabilitas Anggaran terhadap <i>financial distress</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	31
3.2	Rancangan Penelitian	31
3.3	Jenis dan Sumber Data	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data	32
3.5	Populasi dan Sampel	32
3.6	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	34
3.6.1	<i>Financial Distress</i> (Y)	34
3.6.2	Kemandirian Keuangan (X ₁).....	35
3.6.3	Fleksibilitas Keuangan (X ₂)	36
3.6.4	Solvabilitas Jangka Pendek (X ₄)	37
3.6.5	Solvabilitas Jangka Panjang (X ₅)	38
3.6.6	Solvabilitas Anggaran (X ₆)	39
3.7	Teknik Analisis Data.....	40
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	41
3.6.2	Uji Hipotesis.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1	Hasil Penelitian	45
4.1.1	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	45
4.1.2	Hasil Uji Regresi Logistik	48
4.1.2.1	<i>Case Processing Summary</i>	48
4.1.2.2	<i>Dependent Variable Encoding</i>	49

4.1.2.3	Menilai Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit</i>)	50
4.1.2.4	Menguji Kelayakan Regresi	52
4.1.2.5	Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>)	53
4.1.2.6	Hasil Uji Koefisien Regresi (<i>Uji wald</i>).....	54
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	56
4.2.1	Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap <i>financial distress</i>	56
4.2.2	Pengaruh Fleksibilitas Keuangan terhadap <i>financial distress</i>	58
4.2.3	Pengaruh Solvabilitas Jangka Pendek terhadap <i>financial distress</i> ..	60
4.2.4	Pengaruh Solvabilitas Jangka Panjang terhadap <i>financial distress</i> .	62
4.2.5	Pengaruh Solvabilitas Anggaran terhadap <i>financial distress</i>	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		65
5.1	Kesimpulan	65
5.2	Saran.....	67
5.3	Keterbatasan Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014-2018.....	7
Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Daftar Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumsel	33
Tabel 4. 1 Uji Statistik Deskriptif	46
Tabel 4. 2 Jumlah Pengamatan (<i>Case Processing Summary</i>).....	49
Tabel 4. 3 Kategori Variabel Dependen (<i>Dependent Variable Encoding</i>).....	50
Tabel 4. 4 Nilai -2LL yang terdiri hanya dari konstanta	51
Tabel 4. 5 Nilai -2LL yang terdiri hanya dari konstanta dan Variabel Bebas.....	51
Tabel 4. 6 Menguji Kelayakan Model (<i>Hosmer and Lemeshow Test</i>).....	52
Tabel 4. 7 Menguji Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>).....	53
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pemikiran Variabel	26
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian.....	72
Lampiran 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	75
Lampiran 3 Hasil Analisis Uji Regresi Logistik Binner	76
Lampiran 4 Hasil Uji Hipotesis	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2018 yang lalu, implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah genap berusia 18 tahun. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Untuk menyelaraskan kondisi yang terus berkembang, mengakibatkan peraturan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia senantiasa mengalami perubahan. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya Undang-undang mengenai otonomi daerah tersebut diharapkan tiap-tiap daerah mampu mengoptimalkan potensi daerah yang dimilikinya.

Otonomi daerah yang sebelumnya bertujuan untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi seperti ketimpangan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan, tetapi pada kenyataan justru menimbulkan sebuah permasalahan baru karena penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah (Sartika, 2016). Terkait RUU APBN dan Nota Keuangan 2019, belanja negara 2019 ditujukan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya

manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Penguatan desentralisasi fiskal ini ditandai dengan perencanaan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2019 sebesar Rp832,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 9% dari perkiraan realisasi tahun 2018 atau meningkat 45,1% dari realisasinya tahun 2014 sebesar Rp573,7 triliun. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dan Dana Otonomi Khusus. Dengan jumlah sebesar itu artinya pemerintah telah memberikan kepercayaan tinggi terhadap daerah untuk secara mandiri menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya di semua bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter dan fiskal, serta keagamaan. Sejalan dengan terkait tujuan diberlakukannya otonomi daerah yaitu agar daerah memiliki kemampuan untuk membiayai segala kegiatan pembangunannya sehingga menjadi daerah yang mandiri (Rahmawati, 2015). Kemandirian keuangan daerah menggambarkan Tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah maka semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan dana pemerintah pusat begitupun sebaliknya semakin rendah kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pula ketergantungan daerah terhadap bantuan dana pemerintah pusat.

Namun, keadaan yang terjadi ternyata berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Keadaan tersebut justru membuat daerah ketergantungan dengan dana

transfer yang diberikan pemerintah pusat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, masih tingginya ketergantungan daerah terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Secara rata-rata nasional, ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%. Implisit, pemerintah daerah cenderung pasif dalam mengelola potensi PAD-nya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketergantungan fiskal yang semakin tinggi terjadi di pemerintah daerah kota/kabupaten. Padahal, tingkat kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dominasi transfer dari pusat tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaannya (*governance*). Riset empiris Bank Dunia (2001) menunjukkan tingginya ketergantungan pada transfer berbanding terbalik dengan governansinya. Pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam mendayagunakan PAD dari pada dana transfer yang diterima dari pusat Hal itu membuat semakin ketergantungan pemerintah daerah dengan dana transfer yang diberikan pusat. Namun, dari segi kapasitas transfer pemerintah pusat nyatanya juga tidak mencukupi. Kondisi ini menjadi bukti bahwa belum efektifnya implementasi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini. Sebab pemerintah daerah yang berhasil dalam menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pemerintah daerah yang mampu membiayai sendiri pengeluarannya melalui PAD yang diperolehnya.

Kemudian terkait belanja, kenaikan DAU dipersepsikan sebagai bentuk kenaikan tanggung jawab yang dibebankan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyesuaian belanja pemerintah daerah akan lebih tinggi dari pada kenaikan DAU itu sendiri. Jika dilihat dari realisasi belanja pemerintah daerah, kualitas belanja daerah masih kurang baik. Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) menyebutkan bahwa rata-rata rasio secara agregat belanja modal hanya sebesar 24,81% dari total belanja daerah, sedangkan untuk belanja pegawai sebesar 42,78%.

Hal ini menunjukkan belum efektif dan efisiennya kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan belanja daerah khususnya belanja modal. Belanja modal adalah suatu bentuk pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik yang dimana itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belanja modal memiliki peran penting dalam pelayanan publik (Ardhini, 2011). Oleh sebab itu, minimnya jumlah belanja modal yang dikeluarkan akan menyebabkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur (Yanti, 2018). Jika hal itu terjadi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tidak dapat menikmati fasilitas dengan semestinya yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya *financial distress*.

Pada sektor pemerintahan *Financial distress* merupakan suatu menurut ketidakmampuan oleh pemerintah dalam memfasilitasi pelayan publik sesuai dengan standar dan mutu pelayanan yang telah ditetapkan (Jones dan Walker,

2007). Tidak adanya ketersediaan dana menjadi salah satu faktor ketidakmampuan oleh pemerintah didalam menyediakan pelayanan publik tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini *financial distress* dapat diartikan sebagai ketidakmampuan oleh pemerintah dalam memfasilitasi pelayanan publik dengan belanja modal yang digunakan sebagai indikator pengukurnya.

Status *financial distress* dapat dinyatakan pada pemerintah daerah apabila nilai dari rasio belanja modal terhadap total belanja di bawah 30% (Syumirta, 2014). Hal ini masih dianggap relevan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Menurut Dirjen Jenderal Perencanaan Keuangan – Kementerian Keuangan, pemerintah provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 memiliki rata-rata rasio belanja modal secara agregat sebesar 25,75% sehingga masih dibawah target yang diharapkan. Oleh karena itu hal ini perlu diteliti lebih lanjut apakah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah efektif dan efisien dalam mengoptimalkan belanja daerah khususnya belanja modal kinerja pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera yang kaya akan potensi sumber daya alamnya, mulai dari perkebunan, pertanian dan sumber daya mineral (Damanik, 2019). Di provinsi Sumatera Selatan terdapat 13 Kabupaten dan 4 Kota. Kota Palembang yang menjadi ibukota Sumatera Selatan telah banyak mengalami kemajuan yang pesat dalam 5 tahun terakhir ini, bisa dilihat dari maraknya pertumbuhan infrastruktur, sarana dan

prasarana, hingga terus menggeliatnya roda perekonomian (Rachma, 2019) . Hal ini membuktikan bahwa daerah ini dapat terus berkembang lebih jauh lagi baik dalam mengelola sumber daya, peningkatan ekonomi dan kualitas hidup serta meningkatkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakatnya.

Menyediakan pelayanan publik yang baik sesuai dengan standar dan kualitas yang telah ditetapkan merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah. Pada Januari hingga awal Desember tahun 2014 berdasarkan data laporan yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumsel terdapat 164 laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait keluhan pelayanan publik yang didominasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi pemerintah daerah setempat. Terdapat 95 laporan yang dapat diselesaikan dan 69 laporan yang belum dapat diselesaikan dari 164 laporan atau pengaduan yang dilaporkan dalam tahun 2014. Ini menunjukkan masih kurangnya pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah karena masih banyaknya laporan atau keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 Kemandirian keuangan suatu daerah dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu 0% - 0.25% tergolong kategori **belum mandiri**, 25% - 50% tergolong kategori **menuju mandiri**, 50% - 75% tergolong kategori **mandiri**, dan untuk kategori **sangat mandiri** dari 75% - 100%. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dikatakan belum adanya daerah dengan kategori sangat mandiri dan sebagian besar pemerintah provinsi masih dalam kategori **menuju mandiri**. Provinsi

Sumatera Selatan sendiri memiliki indeks kemandirian fiskal rata-rata dari tahun 2013 – 2018 sebesar 0.38715% sehingga pemerintah provinsi Sumatera Selatan masih tergolong kategori **menuju mandiri**. Sedangkan untuk indeks kemandirian fiskal pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1

Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014 - 2018

No	Nama Entitas	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Banyuasin	0.0583	0.0559	0.0534	0.0628	0.0676
2	Kab. Empat Lawang	0.0418	0.0372	0.0279	0.0761	0.0329
3	Kab. Lahat	0.0826	0.1144	0.1072	0.0644	0.0587
4	Kab. Muara Enim	0.0771	0.0902	0.0737	0.0898	0.0920
5	Kab. Musi Banyuasin	0.0550	0.0894	0.0640	0.0792	0.0696
6	Kab. Musi Rawas	0.1053	0.0745	0.0598	0.0978	0.0604
7	Kab. Musi Rawas Utara	0.0339	0.0473	0.0395	0.0411	0.0327
8	Kab. Ogan Ilir	0.0458	0.0399	0.0883	0.0313	0.0391
9	Kab. Ogan Komering Ilir	0.0923	0.0667	0.0551	0.1051	0.1061
10	Kab. Ogan Komering Ulu	0.0732	0.0954	0.0734	0.0892	0.1109
11	Kab. OKU Selatan	0.0377	0.0409	0.0314	0.0349	0.0339
12	Kab. OKU Timur	0.0515	0.0495	0.0456	0.0486	0.0524
13	Kab. PALI	0.0195	0.0363	0.0327	0.0282	0.0607
14	Kota Lubuklinggau	0.0546	0.0812	0.0858	0.0963	0.1143
15	Kota Pagar Alam	0.0489	0.0714	0.0628	0.0807	0.0957
16	Kota Palembang	0.2507	0.2566	0.2502	0.2753	0.2753
17	Kota Prabumulih	0.0733	0.0885	0.0917	0.1070	0.0949

Catatan: Untuk menghitung IKF digunakan Total Pendapatan sebagai *proxy* Belanja
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Pada tabel 1.1 menunjukkan tidak adanya perubahan kemandirian fiskal yang terjadi pemerintahan provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 – 2018.

Sebagian besar kab/kota yang berada di pemerintah provinsi Sumatera Selatan tergolong kategori **belum mandiri**. Pada tahun 2014 – 2018 terdapat 16 daerah (94,12%) yang tergolong kategori **belum mandiri**. Namun, untuk kategori **menuju mandiri** terdapat 1 daerah (5,88%). Jika dilihat pada tahun 2014 – 2018 masih terdapat daerah dengan kemandirian fiskal yang sangat rendah atau dibawah 0.0.5 di kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 4 daerah (29.42%). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir Provinsi Sumatera Selatan dilanda bencana yaitu kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Banyak kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terkena dampak bencana tersebut. Berdasarkan pantauan Satelit Lapan terdapat 66 hotspot di Provinsi Sumatera Selatan diantaranya di Kabupaten Muba terdapat 20 hotspot, Kabupaten OKI 11 hotspot, Kabupaten Musi Rawas (Mura) 16 hotspot. Di Kabupaten Muara Enim ada 6 titik api, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) ada 4 titik api, Kabupaten Banyuasin ada 3 titik api. Kemudian di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dan Lahat ada 2 titik api. Titik api ini juga menyebar di Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir. Dengan adanya bencana tersebut banyak biaya yang diperlukan untuk menanggulunginya. Namun, apakah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat membiayai segala peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Terhadap setiap kemungkinan yang terjadi dimasa yang akan datang baik itu dari segi ekonomi makro ataupun sosial politik *monitoring* terhadap kondisi

kesehatan keuangan daerahnya secara berkala adalah hal yang wajib dilakukan untuk bentuk suatu peringatan dini bagi pemerintah (Maizunati, 2017). Pemantauan terkait dengan kondisi kesehatan keuangan sampai dengan saat ini masih kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya peristiwa-peristiwa yang telah dijelaskan di atas dan mudahnya akses untuk pengambilan data penelitian menjadikan hal ini sebagai alasan penulis memilih Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai objek penelitian.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian yang berhubungan dengan indikator-indikator prediksi *financial distress* diantaranya (Atmaja, 2012), (Pratiwi, 2018), (Sutaryo, Sutopo, & Rahmawati, n.d.), (Rusdi & Fuad, 2018), (Mahayani & Gayatri, 2017). Penelitian ini berkaitan dengan penelitian Yanti (2018) yang meneliti tentang Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tahun pengamatan penelitian, penelitian terdahulu tahun 2012-2016 sedangkan penelitian ini menggunakan tahun pengamatan tahun 2014-2018. Perbedaan lainnya terletak pada tempat pengamatan, penelitian terdahulu mengamati Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat sedangkan penelitian ini mengamati Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan terakhir terletak pada rasio yang digunakan dimana pada penelitian terdahulu masih menggunakan rasio keuangan yang belum diperbarui sedangkan dalam penelitian ini rasio yang digunakan ialah rasio keuangan yang telah diperbarui yang dikeluarkan oleh

kemendagri untuk menganalisis kemungkinan terjadinya *financial distress* yang dimana rasio solvabilitas dibagi menjadi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran dan solvabilitas layanan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi *Financial Distress* Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan terhadap kecenderungan terjadinya *financial distress* ?
2. Bagaimana pengaruh fleksibilitas keuangan terhadap kecenderungan terjadinya *financial distress* ?
3. Bagaimana pengaruh solvabilitas jangka pendek terhadap kecenderungan terjadinya *financial distress* ?
4. Bagaimana pengaruh solvabilitas jangka panjang terhadap kecenderungan terjadinya *financial distress*?
5. Bagaimana pengaruh solvabilitas anggaran terhadap kecenderungan terjadinya *financial distress*?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah dituliskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan terhadap kecenderungan terjadinya *financial distress*.
2. Untuk menguji pengaruh fleksibilitas keuangan terhadap kecenderungan terjadinya *financial distress*
3. Untuk menguji pengaruh solvabilitas jangka pendek terhadap kecenderungan terjadinya *financial distress*
4. Untuk menguji pengaruh solvabilitas jangka panjang terhadap kecenderungan terjadinya *financial distress*
5. Untuk menguji pengaruh anggaran terhadap kecenderungan terjadinya *financial distress*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Untuk memperluas literature tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kecenderungan terjadinya kondisi *financial distress* dalam sektor publik.

2 Praktis

Agar akuntan mengetahui keadaan ataupun kondisi pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam keadaan yang sehat atau dalam kondisi yang tidak sehat. Kemudian dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan lainnya untuk

mengevaluasi kondisi keuangan pemerintahan daerah dalam pengambilan keputusan.

3 Manfaat bagi penulis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengevaluasi kondisi keuangan pemerintah daerah dalam keadaan baik ataupun buruk serta memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab, yang pertama pendahuluan, kedua studi kepustakaan, ketiga metode penelitian, keempat hasil penelitian dan pembahasan serta yang kelima kesimpulan dan saran. Berikut merupakan uraian singkat mengenai isi dari masing-masing bab tersebut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat penelitian secara teoritis, praktis dan bagi peneliti sendiri serta sistematika penulisan yang berisi rencana daftar isi.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai landasan teori yang akan digunakan penulis untuk menunjang dan mendukung dalam melakukan pembahasan masalah yang ada didalam skripsi. Pada bab ini juga akan dijelaskan hasil penelitian

terdahulu yang akan menjadi landasan dalam menentukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini serta alur pikir yang menjelaskan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai penggunaan metode dalam penelitian yang dimana terdiri dari ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel serta teknik analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat tentang hasil pengujian hipotesis yaitu pengaruh dari masing-masing variabel yang terdiri dari kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang serta solvabilitas anggaran terhadap kecenderungan terjadinya financial distress. Pembahasan dalam bab ini terdiri analisis data, dan intepretasi hasil.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bagian bab akhir skripsi ini berisi kesimpulan yang ditarik penulis berdasarkan hasil dari penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya, para pembaca pada umumnya serta bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Artikel

- Abdul, Halim. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardhini. (2011). Pengaruh rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. Online 26 November 2013
- Atmaja, K. F. (2012). Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kemungkinan Financial Distress. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- CICA. (1997). Indicators of Government Financial Condition, Canadian Institute of Chartered Accountants, Toronto.
- Dwijayanti, S. P. F. (2010). Penyebab, Dampak, dan Prediksi dari Financial Distress serta Solusi untuk Mengatasi Financial Distress. *Akuntansi Kontemporer*, 2(2).
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harun. 2009. Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996. *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Mahayani, N. L. M. D. I. M., & Gayatri. (2017). Jumlah Penduduk sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Level Of Capital Outlay terhadap Financial Distress. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(1), 452–478.
- Maizunati, N. A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam Klaster Kota di Jawa-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(2). Retrieved from file:///E:/Bahan Skripsi/Jurnal Penelitian/Jurnal asp Financial distress yang dipakai/jurnal asp FD 9.pdf
- Nollenberger, K., Groves, S.M. & Valente, M.G. (2003). Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Government, *Washington, DC, International City/County Managers Association*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2010. *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2015. *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*.

- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta).
- Pratiwi, M. G. (2018). *Prediksi Status Financial Distress Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2014*.
- Rahmawati, Luluk Atika dan Suryono, Bambang. (2015). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. 4(9).
- Ritonga, I. T. (2014). *Developing A Measure Of Local Government's*. 29(2), 142–164. Retrieved from file:///E:/Bahan Skripsi/Jurnal Penelitian/Jurnal asp Financial distress yang dipakai/jurnal asp FD 10.pdf
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). “ Assessing financial condition of local government in Indonesia : an exploration ” Assessing financial condition of local government in Indonesia : an exploration. *Public and Municipal Finance*, 1(2).
- Rusdi, D., & Fuad, K. (2018). Metode Prediksi Financial Distress di Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah untuk Mengukur Kesejahteraan Ummat. *Ustjogja.Ac.Id*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2008>
- Sartika, D. (2016). Analisis Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2011-2013. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Sholikhah, Ratna. (2011). Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009.
- Sularso, H., & Yanuar E. R. (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Accounting Journal*.
- Sutaryo, Sutopo, B., & Rahmawati. (n.d.). *Relevansi Informasi Laporan Keuangan Cash Modified Basis: Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial distress Pemerintah Daerah di Indonesia*. (1), 0–32.
- Tubels, A. (2015). Evaluasi Financial Distress pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi*.
- Wang, X., Dennis, L. & Tu, Y. S. J. (2007). Measuring financial condition: A study of US states. *Public Budgeting & Finance*, 27, 1-21.
- Widarjono, Agus. (2010). Analisis Statistika Multivariat Terapan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yanti, R. D. (2018). *Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012- 2016 ARTIKEL*.

Internet

Kppod.org. (2014). 276 Kabupaten dan Kota Terancam Bangkrut, diakses 05 September 2019, dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=286>

M.liputan6.com. (2019, 09 September). Titik Api Meluas ke 11 Kabupaten di Sumsel, diakses pada 25 Januari 2019, dari <https://m.liputan6.com/regional/read/4057741/titik-api-meluas-ke-11-kabupaten-di-sumsel>

Tribunnews.com. (2019, 03 Februari). Bukan Aset Daerah, Gubernur Sumsel Tolak Permintaan Menanggung Subsidi LRT Palembang, diakses pada 05 September 2019, dari <https://m.tribunnews.com/regional/2019/02/03/bukan-aset-daerah-gubernur-sumsel-tolak-permintaan-menanggung-subsidi-lrt-palembang?page=2>

Statistikian.com. (2015, 25 Februari). Interpretasi Regresi Logistik dengan SPSS, diakses pada 16 juni 2020, dari <https://www.statistikian.com/2015/02/interpretasi-regresi-logistik-dengan-spss.html?amp#top>

Pelatihan-ui.com. (2020). Pelatihan Statistik, diakses pada 16 juni 2020, dari <https://pelatihan-ui.com/analisa-regresi-logistik-dengan-spss/>